



**JMPIS:**  
**JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN**  
**ILMU SOSIAL**

E-ISSN: 2716-375x  
P-ISSN: 2716-3758

<https://dinastirev.org/JMPIS>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Jaringan Wacana terhadap Kepentingan Aktor dalam Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Perbandingan Negara-negara IMT-GT (Indonesia, Malaysia, dan Thailand)**

**Anisa Rahma Alvionita<sup>1\*</sup>, Sinta Ningrum<sup>2</sup>, Anggia Utami Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, [anisa23021@mail.unpad.ac.id](mailto:anisa23021@mail.unpad.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, [sinta.ningrum@unpad.ac.id](mailto:sinta.ningrum@unpad.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, [anggia.utami@unpad.ac.id](mailto:anggia.utami@unpad.ac.id)

\*Corresponding Author: [anisa23021@mail.unpad.ac.id](mailto:anisa23021@mail.unpad.ac.id)

**Abstract:** *This study examines actor interests in the development of Special Economic Zones (SEZs) within the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Applying the Three-I's framework with a focus on interests and employing Discourse Network Analysis (DNA), the research maps actor networks and identifies policy preferences. The findings reveal distinct orientations across countries. Indonesia prioritizes import substitution, resource-based industries, non-oil and gas exports, and technology transfer; Malaysia emphasizes high-value manufacturing and services, strengthening research and development, and positioning itself as a regional hub; while Thailand advances the Thailand 4.0 agenda, focusing on automotive and electronics clusters and innovation-driven growth. In the socio-political dimension, Indonesia highlights regional equity and local community welfare, Malaysia prioritizes skill and human capital development, while Thailand emphasizes rural development, poverty alleviation, and environmental protection. These results demonstrate that actor preferences shape divergent SEZ policy strategies, underscoring the importance of coordination within the IMT-GT regional cooperation framework.*

**Keywords:** *Special Economic Zone, Actor Interest, Discourses Network Analysis, IMT-GT, Public Policy*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis kepentingan aktor dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di negara anggota Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Dengan menggunakan kerangka *Three-I's* pada aspek *interest* dan metode *Discourse Network Analysis* (DNA), penelitian ini memetakan jaringan aktor sekaligus mengidentifikasi preferensi kebijakan. Hasil menunjukkan adanya perbedaan orientasi di tiap negara. Indonesia menekankan substitusi impor, industri berbasis sumber daya, ekspor non-migas, serta transfer teknologi, Malaysia berfokus pada *high-value manufacturing* dan *services*, penguatan riset dan pengembangan, serta posisi sebagai regional hub, sedangkan Thailand mengedepankan agenda Thailand 4.0 dengan prioritas pada kluster otomotif, elektronik, dan pertumbuhan berbasis inovasi. Pada dimensi sosial-politik, Indonesia menekankan pemerataan wilayah dan kesejahteraan masyarakat lokal, Malaysia pada

pengembangan keterampilan dan *human capital*, sementara Thailand memprioritaskan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan. Temuan ini memperlihatkan bahwa preferensi aktor membentuk strategi kebijakan KEK yang berbeda antarnegara, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi dalam kerangka kerja sama IMT-GT.

**Kata Kunci:** Kawasan Ekonomi Khusus, Kepentingan Aktor, *Discourse Network Analysis*, IMT-GT, Kebijakan Publik

## PENDAHULUAN

*Interest* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “kepentingan” dapat diartikan sebagai keinginan, kebutuhan, hasrat, dan keyakinan yang tidak mungkin dipisahkan. Kepentingan sendiri berasal dari berbagai macam karakteristik baik demografi ataupun sosial ekonomi (Ludwig, 2010). Ambrose (1911) menyatakan bahwa politik sendiri merujuk pada kepentingan dan kebijakan dapat berperan dalam membuat suatu kepentingan. Interest disini mencakup baik kepentingan material maupun ideal yang dimiliki oleh berbagai aktor baik individu maupun kelompok yang mempengaruhi posisi mereka terhadap suatu kebijakan tertentu (Hall, 1997).

Bache dan Flinders (2004) menegaskan bahwa interest dalam analisis kebijakan tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencakup kepentingan politik, sosial, dan strategis yang saling berinteraksi dalam membentuk preferensi kebijakan. Dalam konteks kebijakan KEK pada negara IMT-GT ini analisis terhadap dimensi interest digunakan untuk melihat kepentingan yang dibawa oleh ketiga negara.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand masing-masing memiliki agenda nasional, prioritas pembangunan, dan kepentingan strategis yang berbeda, namun tetap berusaha untuk mencapai konvergensi melalui kerangka kerja sama regional. Sebagaimana dikemukakan oleh Stubbs (2002), dinamika kepentingan dalam kerja sama regional di Asia Tenggara seringkali mencerminkan tension antara kepentingan nasional dan kepentingan regional yang perlu dikelola secara hati-hati.

Untuk menjawab Interest dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Rational Choice Theory* (RCT) sebagai landasan analisis. Dalam hal ini RCT berasumsi bahwa aktor akan bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka berdasarkan preferensi yang sudah ditetapkan dan informasi yang tersedia (Ostrom, 1990). Dalam kebijakan publik, RCT membantu menganalisis bagaimana pemerintah sebagai aktor rasional membuat pilihan kebijakan berdasarkan beberapa kepentingan dan penggunaan strategi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam menerapkan RCT untuk menganalisis Interest terdapat tiga konsep yang digunakan. Pertama, identifikasi aktor yang merupakan langkah awal untuk menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis ini berdasarkan dari asumsi bahwa individu atau institusi sebagai aktor mengejar perilaku yang berorientasi pada tujuan dengan mempertimbangkan kepentingan yang ada (Shepsle, 2010). Dalam konteks identifikasi aktor harus memperhatikan posisi dan peran mereka dalam sistem politik (Weingast, 2002). Dalam penelitian ini aktor-aktor utama adalah pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan organisasi serta lembaga terkait yang berperan.

Kedua, preferensi aktor yang mencerminkan prioritas dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam RCT mengasumsikan bahwa aktor memiliki preferensi yang lengkap, konsisten, dan transitif terhadap berbagai alternatif pilihan yang tersedia (Downs, 1957). Dalam kebijakan KEK ini, preferensi aktor dapat berupa kepentingan ekonomi, politik atau kepentingan

kepentingan strategis. Ketiga, strategi aktor. Dalam konsep ini aktor bertindak secara strategis dengan mempertimbangkan tindakan aktor lain demi mencapai tujuan (Ostrom, 1990).

Analisis komparasi interest dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di negara-negara IMT-GT menggunakan Rational Choice Theory dengan fokus pada tiga dimensi utama sebagaimana dijelaskan diatas. Bentham dan Mill berargumen bahwa landasan tindakan seseorang adalah upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mencegah penderitaan. Bentham kemudian menyatakan ketika “nilai” penderitaan melebihi kebahagiaan, maka seseorang akan menghindari perbuatan yang dilarang (Bentham, 1870). Hal ini secara jelas sejalan dengan tujuan dari para pemangku kebijakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan mencegah keterpurukan. Becker (1974) menjelaskan bahwa pilihan dan keputusan selalu terfokus bagaimana seorang individu mempertimbangkan manfaat/keuntungan dan kerugian.

Setiap aktor tentu membawa tujuan dan kepentingan dengan strategi untuk mencapainya. Perbedaan para aktor ini tentu terlihat dari tujuan yang ingin dicapainya serta sejauh mana aktor ini berperan dalam penyelenggaraan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah tentu memegang andil paling besar dalam proses penyelenggaraan kebijakan. Namun, dengan besarnya dominasi pemerintah bukan berarti peran mereka mutlak dan mampu berdiri sendiri. Maka dari itu, terdapat aktor-aktor lain yang juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kebijakan ini di ketiga negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan melihat lebih jauh terkait dengan keterlibatan aktor serta kepentingan yang dibawahnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Denzen & Lincoln (2018) dinyatakan sebagai penelitian yang melibatkan proses pengumpulan berbagai bahan dan data empiris dari berbagai sumber. Fokus dari penelitian ini adalah memetakan relasi antar aktor dan menetapkan kepentingan yang dibawa oleh setiap aktor terkait dengan kebijakan ini di tiga negara. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan DNA atau Discourses Network Analysis sebagai metode untuk melihat hubungan antar aktor, konsep atau wacana, dan afiliasi; maka data yang ditemukan dapat diolah menggunakan DNA untuk mengeksplorasi jaringan aktor, jaringan wacana, jaringan afiliasi, kesamaan jaringan (kongruensi), dan jaringan konflik antar aktor (Sumirat & Eriyanto, 2023).

Analisis difokuskan pada dimensi interest dalam kerangka Three-I's (ideas, interests, institutions) sebagaimana dikembangkan oleh (Dodds, 2013). Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan penelusuran arsip kebijakan, laporan pemerintah, berita media daring, serta publikasi resmi terkait KEK di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sumber-sumber ini dipilih karena dianggap mewakili wacana publik dan posisi resmi aktor terhadap arah kebijakan KEK.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) coding teks kebijakan dan wacana aktor untuk mengidentifikasi klaim kepentingan, (2) konstruksi two-mode network yang menghubungkan aktor dengan isu, dan (3) visualisasi serta analisis struktur jaringan menggunakan Visone untuk melihat keterhubungan dan preferensi dominan antaraktor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan temuan dari penelitian terkait dengan Interest aktor kebijakan menunjukkan variasi dalam pendekatan dan kepentingan masing-masing negara terhadap pengembangan KEK di ketiga negara. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui 55 artikel yang bersumber dari media online dari setiap negara untuk selanjutnya dilakukan coding untuk memetakan aktor beserta preferensinya. Berikut hasil visualisasi jaringan dari para aktor beserta preferensinya diketiga negara.



tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan dianggap lebih unggul dibandingkan SDM lokal sehingga tidak bisa dikatakan mensejahterahkan warga sekitar. Disamping itu, masyarakat lokal justru memiliki line hijau yang artinya setuju dan mendukung pernyataan terkait pencemaran lingkungan.

Berdasarkan data yang tervisualisasikan diatas peneliti mengidentifikasi adanya pernyataan aktor terkait dengan preferensi kepentingan dalam kebijakan KEK ini yang mendukung dan bertentangan. Adapun contoh pernyataan aktor terkiat dengan konsep KEK sebagai berikut:

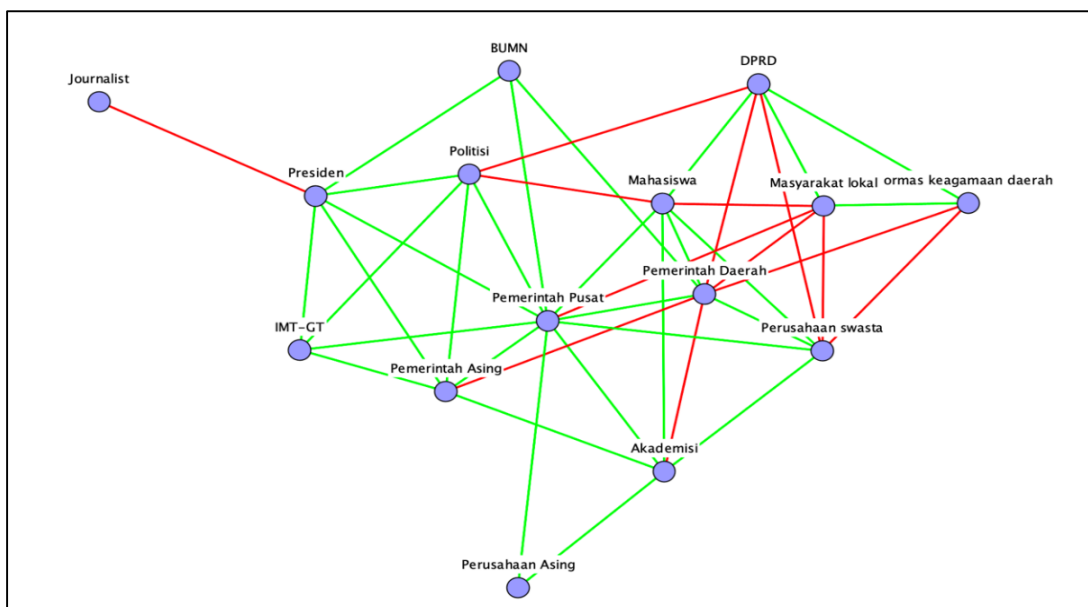
**Tabel 1. Contoh Pernyataan Aktor Terkait Konsep KEK di Indonesia**

No	Aktor	Institusi	Pernyataan
1	Pemerintah Pusat	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	“kami menawarkan proyek investasi kepada inggris untuk KEK sektor kesehatan yang saat ini sedang menjadi fokus kita berlokasi di sanur dan batam”
2	Perusahaan Swasta	PT.BPST	“di KEK ini tercatat 38 perusahaan akan berinvestasi, dan sudah ada 5 yang beroperasi, semuanya sudah mengantongi izin dan sesuai peraturan yang ada”
3	Akademisi	Universitas Syiah Kuala Aceh	“dengan regulasi investasi saat ini rasanya sulit untuk memacu investasi dari luar untuk masuk, terutama di aceh karena proses administrasi ini cukup panjang jadi investor lebih memilih daerah lain dengan administrasi yang lebih sederhana”
4	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	“dibentuknya KEK pariwisata ini merupakan bagian dari strategi peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara maupun asing untuk memperkenalkan keindahan serta kekayaan budaya Pulau Belitung”
5	Masyarakat	Masyarakat lokal	“Wis 3 tahun mlaku ganok manfaate gae warga Singosari. Pak Presiden Prabowo, tulung bubarno ae wis KEK iki! (Sudah 3 tahun berjalan tidak ada manfaatnya bagi warga Singosari. Pak Presiden Prabowo tolong bubarkan saja KEK ini!)”

Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

Dari beberapa contoh pernyataan yang dijadikan sebagai visualisasi jaringan aktor kebijakan dengan kepentingan yang dibawahnya kita dapat melihat preferensi setiap aktor terkait dengan kebijakan ini. Selain itu, peneliti juga melakukan visualisasi untuk melihat koneksi antar aktor. Berikut digambarkan visualisasi koneksi antar aktor terkait kebijakan KEK di Indonesia:



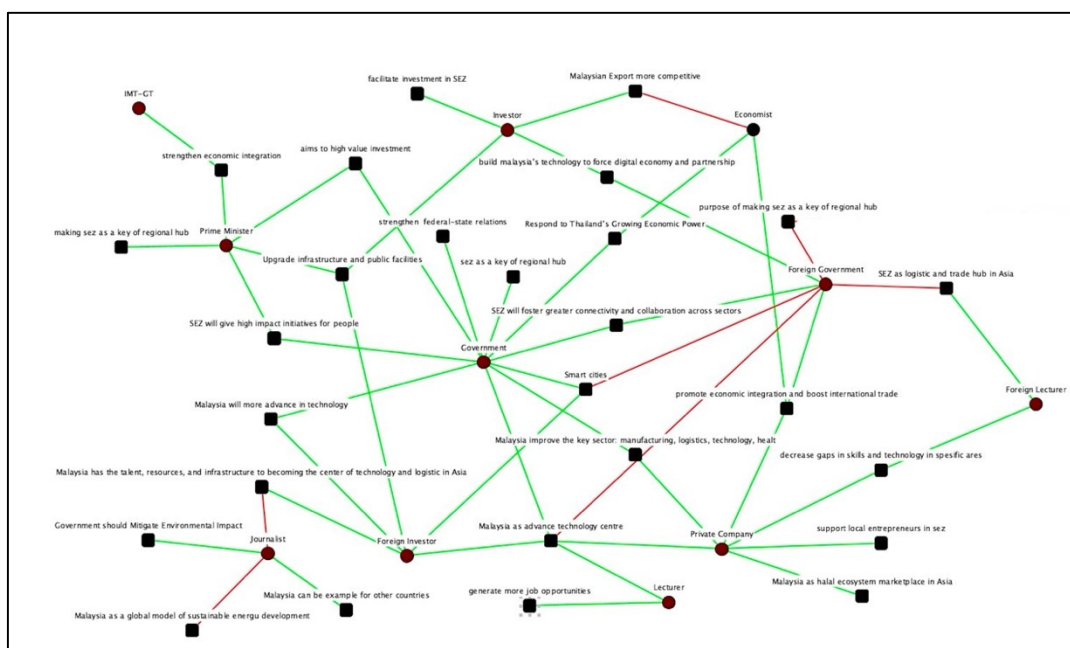


Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

**Gambar 2. Visualisasi Jaringan Aktor Kebijakan KEK di Indonesia**

Dari hasil visualisasi diatas bisa dilihat bahwa aktor non-pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dan mahasiswa menunjukkan lebih banyak pertentangan terkait dengan kebijakan ini. Disisi lain, pemerintah baik pusat, asing, dan daerah, serta perusahaan swasta lokal maupun asing menunjukkan lebih banyak dukungan dan sentiment positif terhadap kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan ditemukan dalam kebijakan ini. Aktor yang terlibat dalam pemerintahan cenderung memiliki lebih banyak Interest karena terlibat dalam kepentingan ekonomi, politik, maupun hubungan dengan pihak lainnya. Aktor non-pemerintah lebih terfokus pada kepentingan sosial dan lingkungan.

### Hasil dan Network Visualization pada Actor Interest di Malaysia



Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

**Gambar 3. Visualisasi Jaringan Preferensi Aktor Malaysia**

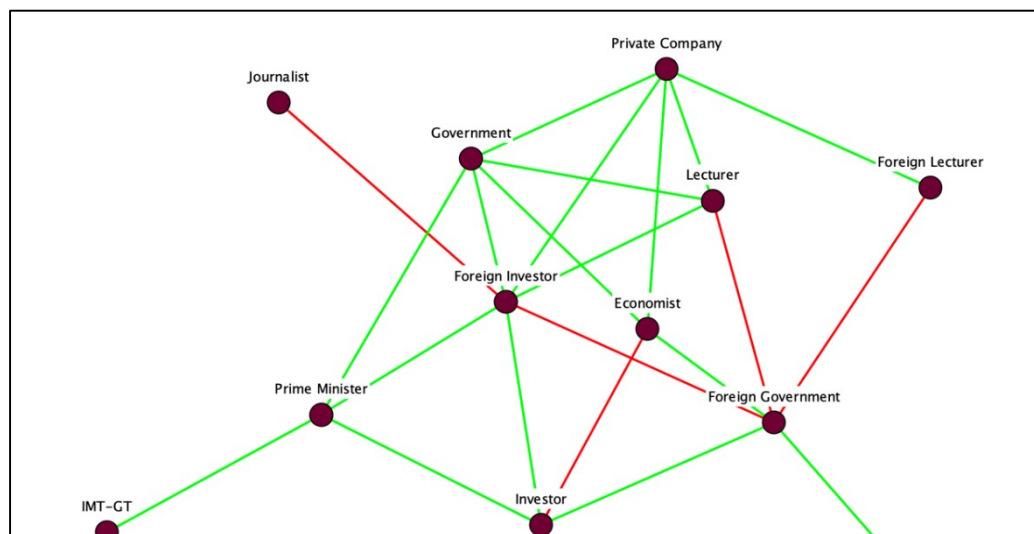
Melihat hasil visualisasi jaringan aktor dengan kepentingannya Malaysia, dapat ditemukan bahwa pemerintah tetap memegang peranan dominan dalam kebijakan. Malaysia melalui perdana menteri juga aktif untuk menyuarakan fokus kebijakan KEK mereka yang memang ditujukan menjadi pusat teknologi dan menjadi pusat transportasi kawasan. Selain itu, pemerintah mereka juga merespon terhadap perkembangan KEK negara tetangga dengan upaya untuk peningkatan sektor yang sama. Pertentangan yang ditandai dengan line merah justru banyak dikeluarkan oleh pemerintah asing yang menyoroti keinginan Malaysia untuk menjadi pusat teknologi terbaru serta sebagai pusat perdagangan dan logistik di Asia. Hal ini dinilai terlalu sulit untuk dicapai dalam waktu dekat mengingat Malaysia juga berkompetisi dengan negara tetangga lainnya.

Dari hasil visualisasi kepentingan yang dikeluarkan oleh berbagai aktor di Malaysia, negara ini menunjukkan konsistensi dalam pengembangannya menjadi pusat teknologi. Kepentingan-kepentingan yang muncul dari berbagai aktor seperti *Malaysia will advance in technology; build Malaysia's technology to force digital economy and partnership; Malaysia as technology centre; and smart cities* merupakan konsep yang dikeluarkan oleh aktor kebijakan terkait KEK di negara ini. Hal ini menunjukkan komitmen besar dari para aktor kebijakan terkait dengan fokus dan tujuan utama mereka. Adapun contoh dari beberapa pernyataan aktor di Malaysia terkait kebijakan ini dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2. Contoh Pernyataan Aktor Terkait Konsep KEK di Malaysia**

No	Aktor	Institusi	Pernyataan
1	Prime Minister	Government	<i>“zone will promote greater economic integration and boost intra-regional trade, as well as enhance Southeast Asia's resilience as an economic bloc”</i>
2	Investor	Maybank	<i>“the SEZ could make Malaysian exports more competitive by streamlining the supply chain”</i>
3	Foreign lecturer	Lecturer at National University of Singapore	<i>“strategic location of the SEZ in Malaysia makes it a "strong contender" for becoming a logistics and trade hub in Southeast Asia.”</i>
4	Foreign Government	Indonesia's government	<i>“Malaysia were trying to replicate Indonesia's idea of establishing special economic zones (SEZs) to bring in investments and their ideas to become technology centre is so far”</i>
5	Private company	Dayone Data	<i>“The SEZ not just to build data centres, but to embed ourselves in Malaysia's digital economy by localising our supply chain, developing skilled local talent, and building long-term partnerships with both federal and state governments”</i>

Berbagai aktor ini kemudian dipetakan peneliti untuk melihat relasi antar aktor dan keterkaitan mereka satu sama lain. Berikut adalah hasil visualisasi koneksi antar aktor terkait kebijakan KEK di Malaysia :

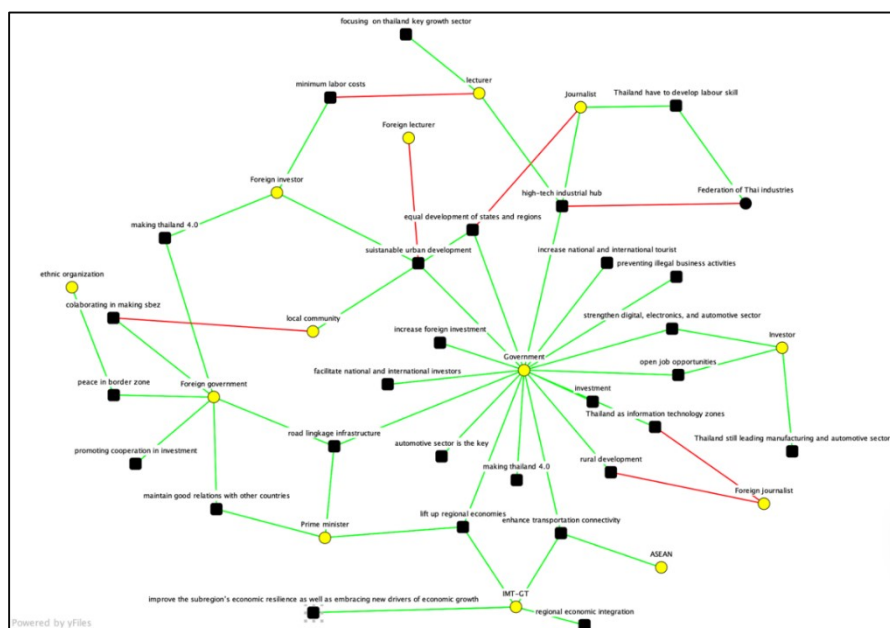


Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

**Gambar 4. Visualisasi Jaringan Aktor Kebijakan KEK di Malaysia**

Dari hasil visualisasi jaringan koneksi aktor terkait kebijakan KEK di Malaysia bisa dilihat bahwa aktor pemerintah memiliki keterkaitan hamper dengan seluruh aktor lainnya. Sentiment positif banyak ditujukan terhadap perdana menteri, pemerintah, dan perusahaan swasta dalam kebijakan ini. Jika melihat dari visualisasi sebelumnya yang dimiliki Indonesia dimana akademisi cenderung bertentangan dengan pemerintah. Namun, akademisi dalam jaringan aktor Malaysia justru mendukung pemerintah dan memberikan sentiment negative terhadap pemerintah asing yang memberikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Malaysia yang ingin menjadi pusat teknologi dan transit kawasan.

### Hasil dan Network Visualization pada Actor Interest di Thailand



Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

**Gambar 5. Visualisasi Jaringan Preferensi Aktor di Thailand**



Melihat hasil visualisasi jaringan aktor dan preferensinya di Thailand, sama seperti dua negara sebelumnya pemerintah tetap memegang peranan dan kepentingan dominan dalam kebijakan ini, *sentiment positif* banyak diberikan oleh pemerintah thailand maupun pemerintah asing. Disisi lain, menyoroti line merah yang ada dalam hasil visualisasi menunjukkan adanya pertentangan dan ketidaksetujuan terhadap konsep dalam kebijakan ini. Local community atau masyarakat lokal memberikan *sentiment negative* terhadap *collaborating in making sbez*. Hal ini dikarenakan alasan keamanan yang dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat sekitar untuk memberi akses langsung pada warga asing di perbatasan. Hal ini juga disoroti oleh pemerintah negara asing yang berencana untuk terlibat dalam proyek *special border economic zone* bersama Thailand yaitu Kamboja dan Laos yang mendukung untuk konsep *peace in border zone*

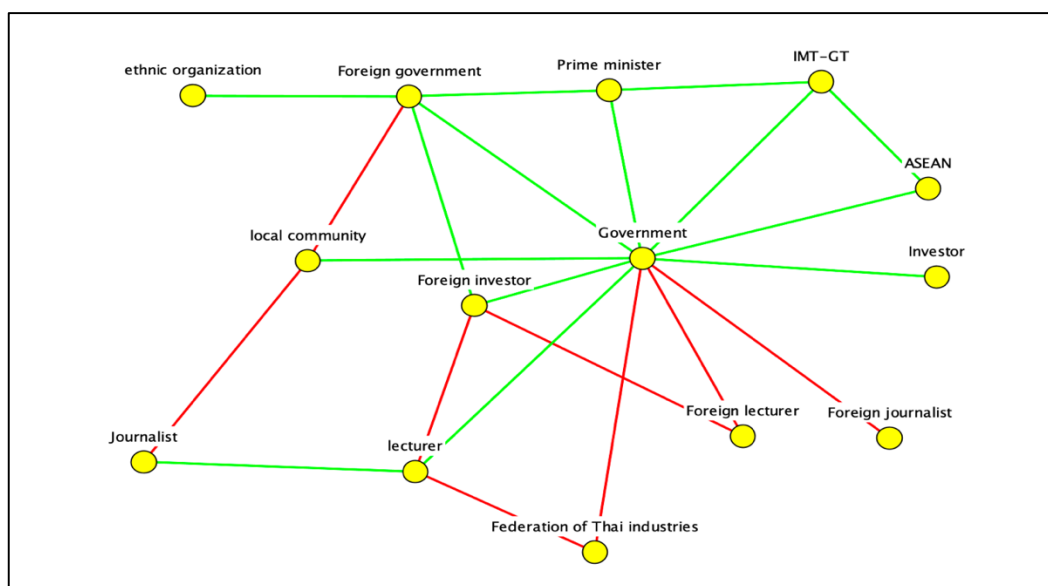
**Tabel 3. Contoh Pernyataan Aktor Terkait Konsep KEK di Thailand**

No	Aktor	Institusi	Pernyataan
1	Board of Investment	Government	<i>“If we look at the industries, we will find that digital, electronics, and automotive are strong, with FDI soaring to more than 260 billion baht.”</i>
2	Prime Minister	Government	<i>“Thailand needs new special economic zones beyond the EEC to help more people and distribute economic development to other regions”</i>
3	Foreign Government	Laos	<i>“The move of SEZ aimed to address transnational crime in the zone, thus maintaining social order and security, and preventing illegal business activities from operating in the Lao territory..”</i>
4	Foreign Government	Myanmar	<i>“The government was striving toward equal development of states and regions and spoke of the requirement for the project works to be completed on time to full standard, the need for the Region government to prevent waste of funds... Stability and peace could only be achieved when regions develop”</i>
5	Foreign Lecturer	Universiti Malaysia's Economics and Management Faculty of and	<i>“The proposed establishment of the Southern Thailand Special Economic Zone is expected to significantly boost the local economy by attracting investments and fostering economic activities, but this is very risk with environmental issues...”</i>

Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

Pemerintah Thailand yang fokus pada Thailand 4.0 tetap mengacu pada kepentingan awal dari pembentukan KEK negara ini yaitu untuk pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil gap antara pusat dan daerah. Namun hal ini justru mendapat sentiment negative dari media asing yang menyatakan bahwa thailand justru lebih fokus pada pengembangan daerah well-known yang mereka miliki seperti Bangkok dan Phuket sehingga untuk menciptakan rural development masih memerlukan waktu yang panjang.

Berbagai aktor yang terlibat dalam kebijakan KEK di Thailand ini selanjutnya dipetakan oleh peneliti untuk melihat jaringan koneksi antar aktor. Dari visualisasi ini peneliti bisa melihat hubungan antar aktor dan keterkaitannya satu sama lain. Berikut adalah hasil visualisasi jaringan koneksi aktor terhadap kebijakan KEK di Thailand:



Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

**Gambar 6. Visualisasi Jaringan Aktor Kebijakan KEK di Thailand**

Berdasarkan dari visualisasi diatas bisa dilihat bahwa pemerintah cenderung mendapat dukungan dan sentiment positif dari aktor lainnya. Pertentangan justru didapatkan dari akademisi, masyarakat dan media yang banyak menyoroti terkait dengan kebijakan KEK di negara ini. Untuk melihat para aktor yang dipetakan dalam visualisasi jaringan, berikut adalah para aktor kebijakan KEK dari ketiga negara yang telah diidentifikasi:

**Tabel 4. Identifikasi Aktor Kebijakan KEK pada Negara Anggota IMT-GT**

Identifikasi Aktor			
	Indonesia	Malaysia	Thailand
Pemerintah	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Investasi/BKPM 3. Pemerintah daerah 4. Dewan Kawasan Ekonomi Khusus 5. BUMN 6. Akademisi	1. <i>Economic Planning Unit (EPU)</i> 2. MIDA sebagai promotor investasi 3. Iskandar Regional Development Authority (IRDA) untuk KEK flagship 4. <i>State Economic Development Corporations (SEDCs)</i> untuk	1. <i>Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)</i> 2. BOI sebagai investment promotion agency 3. <i>Industrial Estate Authority of Thailand</i>

		implementasi regional	4. Provincial administrative organizations
Swasta	Aktor swasta yang memegang peranan besar adalah BUMN yang membuka Private Partnership, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genting Group dalam Iskandar Malaysia</li> <li>2. Sime Darby untuk pengembangan lahan</li> <li>3. Foreign direct investment melalui MIDA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP Group sebagai conglomerate utama</li> <li>2. PTT untuk sektor energi dan petrokimia</li> <li>3. Foreign investors melalui BOI incentives</li> </ol>
Aktor Multilateral atau Regional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asian Development Bank (ADB)</li> <li>2. ASEAN</li> </ol>		
Aktor lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat lokal</li> <li>2. Organisasi lingkungan atau NGO lingkungan</li> </ol>		

Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

Peneliti juga telah memetakan preferensi aktor tiap negara berdasarkan dengan orientasi ekonomi dan sosial politiknya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melihat perbandingan preferensi aktor yang telah ditemukan dengan *Network Visualization* pada *Actor Interest* sebagaimana yang telah muncul diatas. Berikut adalah tabel perbandingan preferensi aktor ketiga negara:

**Tabel 5. Perbandingan Preferensi "Interest" Aktor Kebijakan KEK Negara IMT-GT**

Preferensi Aktor			
	Indonesia	Malaysia	Thailand
Orientasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas substitusi impor</li> <li>• Fokus pada <i>resource based industries</i></li> <li>• Target ekspor non-migas dan <i>manufactured goods</i></li> <li>• Preferensi terhadap transfer teknologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi <i>high-value manufacturing dan services</i></li> <li>• Fokus pada peningkatan ekonomi melalui <i>research and development</i></li> <li>• Target menjadi regional hub untuk MNCs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Focus pada Thailand 4.0 dan digital economy</li> <li>• Prioritas <i>automotive dan electronics clusters</i></li> <li>• Preferensi terhadap innovation driven growth</li> </ul>
Sosial Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan pengembangan wilayah</li> <li>• Kesejahteraan UMKM dan Masyarakat lokal</li> <li>• Environmental sustainability</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan skill development dan human capital</li> <li>• Political consideration terhadap state-federal relations</li> <li>• Focus pada sustainable development goals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferensi terhadap rural development dan poverty alleviation</li> <li>• Environmental protection requirements</li> <li>• Border Peace</li> </ul>

Sumber: (Data yang diolah oleh Peneliti, 2025)

Setelah mengidentifikasi aktor dan kepentingan yang dibawanya dalam kebijakan ini. Setiap aktor yang terlibat tentu berusaha untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Atas dasar

tersebut perlu adanya strategi yang dilakukan setiap negara melalui aktor yang terlibat dengan fokus pada preferensinya masing-masing. Di Indonesia, strategi pemerintah mengadopsi pendekatan resource based industrialization, dengan fokus pada pemanfaatan komoditas unggulan utama, pengembangan infrastruktur negara, serta kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan regional (Kim, 2024).

Disamping itu pemerintah Indonesia juga secara sigap merespon tawaran investasi yang datang dalam pembentukan KEK di Indonesia. Pemerintah berusaha untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dan pemerintah daerah untuk kolaborasi maksimal. Disisi lain, pemerintah juga mulai membuka peluang untuk melebarkan sayap dengan menjajah sektor-sektor unggulan yang terbukti berhasil di negara lain.

Di Malaysia, strategi pemerintah selaras dengan visi knowledge economy, dimana Malaysia memang berfokus pada penargetan industri high-tech dengan, liberalisasi sektor pendidikan untuk pengembangan talenta, promosi sektor jasa, serta kerjasama publik-swasta (Yean, 2021). Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan perjanjian transfer teknologi dengan universitas lokal untuk memperkuat pusat inovasi.

Malaysia sendiri sejak dahulu menerapkan strategi untuk mengizinkan semua jenis investasi tanpa memandang skala besar dan kecilnya industri. Infrastruktur disediakan oleh pemerintah, kecuali logistik yang diatur oleh pihak swasta. Selain mengurus investor yang datang, pemerintah Malaysia juga turut terlibat dalam memberikan akses dan kemudahan bagi keluarga investor, seperti mendirikan sekolah internasional dan pusat pembelajaran bagi anak-anak investor (Wahyuni et al., 2012).

Thailand, melalui inisiatif Thailand 4.0 fokus membangun ekosistem inovasi, mengintegrasikan konsep smart city dalam pengembangan SEZ, serta memperkuat konektivitas regional sebagai bagian dari transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan (BOI, 2022). Thailand juga menerapkan strategi investasi yang berfokus pada industri otomotif dan elektronik yang memang menjadi keunggulan dari negara ini (Bui & Preechametta, 2021).

Dalam menjalankan Kerjasama dibawah naungan IMT-GT ini tentu diperlukan sinergi dan Kerjasama yang baik antar negara. Visualisasi diatas menunjukkan bahwa ketiga negara masing-masing memiliki aktor yang membawa preferensi dan menerapkan strategi untuk mencapai tujuan nasional negaranya.

## KESIMPULAN

*Discourse Network Analysis* (DNA), terlihat bahwa aktor pemerintah memiliki posisi dominan dalam mendorong kebijakan KEK, terutama terkait penciptaan investasi dan lapangan kerja, sementara aktor non-pemerintah seperti pelaku usaha dan masyarakat sipil cenderung berperan sebagai penyeimbang dengan menekankan isu keberlanjutan, pemerataan manfaat, serta dampak sosial-ekonomi.

Hasil pemetaan jaringan memperlihatkan adanya variasi preferensi antarnegara: Indonesia cenderung menekankan penguatan regulasi dan insentif fiskal, Malaysia lebih berorientasi pada integrasi regional dan investasi asing, sedangkan Thailand menonjolkan strategi pengembangan berbasis pariwisata dan konektivitas. Perbedaan preferensi ini sekaligus mencerminkan konfigurasi kepentingan aktor domestik dan bagaimana institusi di tiap negara membentuk arah kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap peta kepentingan aktor melalui analisis jaringan wacana penting untuk melihat dinamika kebijakan KEK di kawasan IMT-GT. Temuan ini tidak hanya memperkaya literatur tentang *policy interests* dalam kerangka Three-Is, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi kolaboratif dan inklusif antaraktor lintas negara.

## REFERENSI

- Bache Matthew, I. A.-F. (2004). *Multi-level governance*. Oxford University Press.
- Becker, G., S. (1974). *Crime and punishment: An economic approach*. In *Essays in the Economics of Crime and Punishment* (National Bureau of Economic Research & Columbia (ed.)). University Press.
- Bentham, J. (1870). *Rationale of punishment*,. Robert Heward.
- Bierce, A. (1911). *The devil's dictionary*. Cleveland, World Pub. Co.
- BOI, T. B. of I. (2022). *Thailand 4.0 and the Eastern Economic Corridor (EEC)*.
- Bui, M. T. T., & Preechametta, A. (2021). Will manufacturing investors go to border zones? The case of central Thailand. *International Journal of Emerging Markets*, 16(2), 323–346. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0567>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *Introduction: The Discipline & Practice of Qualitative Research*. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds) (he Sage Ha). SAGE Publications Inc.
- Dodds,A. (2013). *Comaparative Public Policy*. Palgrave Macmillan
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Hall, P. A. (1997). *The role of interests, institutions, and ideas in the comparative political economy of the industrialized nations BT - Comparative politics: Rationality, culture, and structure* (M. I. E.-Z. Lichbach Alan S. (ed.); pp. 174–207). Cambridge University Press.
- Kim, K. (2024). Indonesia's Resource-Based Industrialization: Achievements and Challenges. *Global Asia*, 19(2).
- Ludwig, K. (2010). Donald Davidson: Essays on actions and events. *Central Works of Philosophy Volume 5: The Twentieth Century: Quine and After*, August, 146–165. <https://doi.org/10.1017/UPO9781844653621.009>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Shepsle, K. A. (2010). *Analyzing politics: Rationality, behavior, and institutions* (2nd ed.). W. W. Norton & Company.
- Stubbs, R. (2002). ASEAN plus three: Emerging East Asian regionalism? *Asian Survey*, 42(3), 440–455.
- Sumirat, P. A., & Eriyanto, E. (2023). Koalisi Wacana dalam Debat Pemekaran Papua: Analisis Jaringan Wacana Debat Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua. *Jurnal Riset Komunikasi*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.739>
- Wahyuni, S., Anoviar, A. N., & Santoso, A. J. (2012). The Key Success Factors of Penang as the Silicon Valley of the East Authors : *SBS JOURNAL OF APPLIED BUSINESS RESEARCH (SBS-JABR)*, 1(September), 1–18.
- Weingast, B. R. (2002). Rational choice institutionalism. In *Political Science: The Science of Politics* (Vol. 3, pp. 660–692).
- Yean, T. S. (2021). *Malaysia's Transformation to a Knowledge Economy*. ISEAS Yusof Ishak Institute.